

## Teachers and Parents Perceptions of the 9-Year Compulsory Education Policy in Indonesia

*Persepsi Guru dan Orang Tua terhadap Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun di Indonesia*

**M. Ferry Irawan<sup>1)\*</sup>, Sinta Bella<sup>1)</sup>, Alia Latifah<sup>1)</sup>**

<sup>1)</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

\*Correspondence: 22204082018@student.uin-suka.ac.id

---

### ABSTRACT

*The Nine-Year Compulsory Education Policy in Indonesia aims to enhance access to and quality of basic education for all school-aged children. This study aims to analyze the perceptions of teachers and parents regarding this policy and to identify the factors influencing their views. The research methodology employed includes both quantitative and qualitative approaches. Data were collected through questionnaires and in-depth interviews with teachers and parents in several regions of Indonesia. The analysis techniques used include frequency distribution, percentages and averages to describe teachers' and parents' perceptions of the 9 Year Compulsory Education policy. The results indicate that the majority of teachers and parents support this policy, despite some challenges in its implementation. Factors such as economic conditions, accessibility to education, and the quality of educational facilities influence their perceptions. The recommendations from this study include increased policy socialization, provision of adequate educational facilities, and enhancement of teacher competencies.*

**Keywords:** Basic Education; Nine-Year Compulsory Education; Parent Perception; Teacher Perception.

---

### ABSTRAK

Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar bagi seluruh anak usia sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi guru dan orang tua terhadap kebijakan tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara mendalam dengan guru dan orang tua di beberapa daerah di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan meliputi distribusi frekuensi, persentase, dan rata-rata untuk menggambarkan persepsi guru dan orang tua terhadap kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar guru dan orang tua mendukung kebijakan ini, meskipun terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, aksesibilitas pendidikan, dan kualitas sarana-prasarana pendidikan turut mempengaruhi persepsi mereka. Rekomendasi dari penelitian ini adalah peningkatan sosialisasi kebijakan, penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai, dan peningkatan kompetensi guru.

**Kata Kunci:** Pendidikan Dasar; Persepsi Guru; Persepsi Orang Tua; Wajib Belajar 9 Tahun

---

**Received:** 9 Sep 2024; **Revised:** 12 Sep 2024; **Accepted:** 13 Sep 2024; **Available Online:** 14 Sep 2024

---

*This is an open access article under the [CC - BY](#) license.*



## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sebuah negara (Sanga & Wangdra, 2023). Di Indonesia, pendidikan telah menjadi fokus penting sejak era kemerdekaan, dengan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan (Wahyudi & Lutfi, 2019). Salah satu kebijakan signifikan yang telah diterapkan adalah kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar yang layak selama sembilan tahun, mencakup enam tahun di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan tiga tahun di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) (Kosasih, 2019).

Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun pertama kali dicanangkan pada tahun 1994 oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mengurangi angka putus sekolah. Program ini berlandaskan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Program ini juga sejalan dengan tujuan global yang diusung oleh UNESCO dalam *Education for All* (EFA) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang menekankan pentingnya pendidikan dasar yang inklusif dan berkualitas untuk semua anak (Rosyulianty et al., 2018).

Meskipun kebijakan ini telah berjalan lebih dari dua dekade, berbagai tantangan masih menghambat pelaksanaannya. Tantangan-tantangan ini meliputi faktor ekonomi, geografis, sosial, dan kualitas pendidikan itu sendiri (Sari & Khoiri, 2023). Di banyak daerah, terutama di daerah terpencil dan pedesaan, akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai masih menjadi masalah utama. Jarak yang jauh ke sekolah, kurangnya sarana transportasi, dan kondisi infrastruktur yang buruk seringkali menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mengenyam pendidikan.

Selain itu, faktor ekonomi juga memainkan peran penting. Banyak keluarga di Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga anak-anak mereka seringkali harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, mengorbankan pendidikan mereka (Nihayah, 2016). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024, sekitar 9,78 persen penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2024). Hal ini tentunya mempengaruhi kemampuan keluarga dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka.

Dari sisi kualitas pendidikan, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan. Meskipun angka partisipasi sekolah dasar dan menengah pertama telah meningkat, kualitas pendidikan yang diterima siswa masih perlu ditingkatkan. Hal ini mencakup kualitas guru, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendidikan. Menurut laporan *World Bank* (2020), kualitas pendidikan di Indonesia masih perlu banyak perbaikan untuk mencapai standar internasional.

Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun di Indonesia telah menjadi upaya penting pemerintah untuk memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan dasar yang layak (Sari & Khoiri, 2023). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mengurangi angka putus sekolah, yang selama ini menjadi masalah serius di banyak daerah di Indonesia (Tambunan et al., 2020). Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, angka partisipasi kasar (APK) pada tingkat sekolah dasar mencapai 94,72% pada tahun 2024, namun angka tersebut menurun drastis menjadi 76,8% pada tingkat SMP di beberapa daerah terpencil dan pedesaan (Badan Pusat Statistik, 2024). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam akses pendidikan yang perlu segera diatasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis persepsi guru dan orang tua terhadap kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun di Indonesia. Guru dan orang tua merupakan dua pemangku kepentingan utama dalam implementasi kebijakan pendidikan. Persepsi mereka sangat penting karena dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Guru, sebagai pelaksana utama di lapangan, memiliki pandangan dan pengalaman langsung mengenai pelaksanaan kebijakan ini. Sementara itu, orang tua, sebagai pihak yang mendukung anak-anak mereka dalam proses pendidikan, juga memiliki pandangan yang signifikan terkait kebijakan ini.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami persepsi para pemangku kepentingan utama yakni guru dan orang tua terhadap kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun. Persepsi ini sangat penting karena guru merupakan pelaksana kebijakan di lapangan, sedangkan orang tua adalah pihak yang secara langsung mendukung dan mengarahkan anak-anak mereka dalam memperoleh pendidikan. Dengan memahami bagaimana kedua kelompok ini memandang kebijakan tersebut, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Selain itu, penelitian ini juga mendesak karena adanya indikasi bahwa tantangan-tantangan struktural seperti kualitas sarana-prasarana, kondisi ekonomi, dan aksesibilitas pendidikan dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk mengumpulkan data mengenai persepsi guru dan orang tua terhadap kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun di Indonesia (Sugiyono, 2018). Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 100 guru dan 100 orang tua

yang dipilih secara acak di daerah Yogyakarta. Pemilihan responden dilakukan secara proporsional berdasarkan tingkat keterwakilan masing-masing wilayah.

Kuesioner dirancang dengan mempertimbangkan beberapa indikator utama, yaitu aksesibilitas pendidikan, kualitas sarana-prasarana, dukungan pemerintah, serta kondisi ekonomi keluarga. Indikator-indikator ini dipilih dengan mengacu pada teori input-output pendidikan oleh Coleman (Coleman, 1966), yang menyatakan bahwa input seperti kondisi ekonomi, akses terhadap fasilitas pendidikan, dan kualitas sarana-prasarana memiliki dampak langsung terhadap output pendidikan, seperti prestasi siswa dan angka partisipasi sekolah. Teori ini dipilih karena memberikan kerangka yang jelas untuk menganalisis bagaimana berbagai input pendidikan dapat memengaruhi hasil pendidikan serta menekankan pentingnya konteks sosial dan ekonomi dalam memahami keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan pendidikan.

Prosedur pengumpulan data dilakukan selama dua bulan, dimulai dari bulan Mei hingga Juli 2024. Data yang diperoleh dari hasil survei ini kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan meliputi distribusi frekuensi, persentase, dan rata-rata untuk menggambarkan persepsi guru dan orang tua terhadap kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun (Melyza & Aguss, 2021). Analisis ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tren dan pola persepsi dari responden, serta memungkinkan identifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Persepsi Guru Terhadap Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas guru (85%) memiliki persepsi positif terhadap kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun. Mereka percaya bahwa kebijakan ini penting untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Guru-guru yang disurvei menyatakan bahwa kebijakan ini telah berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mengurangi angka putus sekolah di daerah mereka. Untuk lebih jelas, hasil survei dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

**Tabel 1.** Hasil Survei Persepsi Guru Terhadap Kebijakan

| Kategori Persepsi | Jumlah Guru | Persentase (%) |
|-------------------|-------------|----------------|
| Sangat Positif    | 25          | 25%            |
| Positif           | 60          | 60%            |
| Netral            | 10          | 10%            |
| Negatif           | 5           | 5%             |
| Sangat Negatif    | 0           | 0%             |
| Total             | 100         | 100%           |

Beberapa guru mengungkapkan bahwa kebijakan ini memberikan kesempatan bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak. Selain itu, guru-guru juga menyatakan bahwa adanya kebijakan ini memotivasi mereka untuk lebih meningkatkan kualitas pengajaran, karena mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk mendukung tujuan nasional dalam pendidikan.

Namun, ada juga tantangan yang dihadapi oleh para guru. Sekitar 40% guru menyebutkan bahwa mereka sering menghadapi masalah dengan jumlah siswa yang terlalu banyak dalam satu kelas. *Overcrowded classrooms* menjadi salah satu masalah utama, terutama di sekolah-sekolah di daerah perkotaan. Hal ini menghambat efektivitas proses belajar-mengajar dan membuat guru kesulitan untuk memberikan perhatian yang cukup kepada setiap siswa.

Guru-guru di daerah pedesaan dan terpencil menghadapi tantangan yang berbeda. Mereka seringkali harus bekerja dengan fasilitas yang sangat terbatas. Beberapa sekolah di daerah terpencil bahkan tidak memiliki akses listrik dan internet yang memadai, sehingga sulit untuk menerapkan metode pengajaran yang lebih modern dan interaktif. Selain itu, kondisi geografis yang sulit juga membuat guru kesulitan untuk datang ke sekolah, terutama saat musim hujan.

Persepsi positif guru terhadap kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun menunjukkan bahwa ada dukungan yang kuat dari para pelaksana pendidikan di lapangan. Dukungan ini penting karena guru merupakan aktor utama dalam implementasi kebijakan pendidikan. Menurut Yuliah dalam penelitiannya mengatakan bahwa

keberhasilan sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh bagaimana aktor-aktor di lapangan memahami dan mendukung kebijakan tersebut (Yuliah, 2020).

Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi oleh para guru juga perlu mendapat perhatian serius. *Overcrowded classrooms* dapat menghambat efektivitas pengajaran dan belajar siswa. Menurut laporan UNESCO, rasio guru terhadap siswa yang ideal adalah sekitar 1:20 untuk tingkat SD dan 1:25 untuk tingkat SMP (UNESCO, 2019). Namun, di banyak sekolah di Indonesia, rasio ini jauh lebih tinggi. Laporan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa di beberapa daerah, rasio guru-siswa dapat mencapai 1:40 atau lebih, yang menunjukkan adanya kekurangan guru di lapangan dan distribusi yang tidak merata (Kemdikbud, 2021). Penelitian oleh Prabowo & Aimah (Prabowo & Aimah, 2024) juga menggarisbawahi perlunya upaya untuk menambah jumlah guru dan memperbaiki distribusi mereka di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini memerlukan perhatian serius untuk memastikan bahwa kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak yang maksimal bagi semua siswa di Indonesia.

Selain itu, kondisi fasilitas pendidikan yang kurang memadai, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, juga menjadi hambatan serius. Menurut laporan *World Bank*, kualitas fasilitas pendidikan memiliki dampak langsung terhadap kualitas pembelajaran yang diterima siswa (Triwijayanti et al., 2022). Pemerintah perlu melakukan investasi lebih besar dalam infrastruktur pendidikan, terutama di daerah-daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian.

Dukungan dan pelatihan bagi guru juga sangat penting. Menurut penelitian oleh Nabillah dan Abdi, kualitas guru merupakan salah satu faktor paling penting yang mempengaruhi prestasi siswa (Nabillah & Abadi, 2020). Oleh karena itu, program pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengajar dengan efektif.

### Persepsi Orang Tua Terhadap Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas orang tua (78%) memiliki persepsi positif terhadap kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun. Mereka merasa bahwa kebijakan ini memberikan kesempatan bagi anak-anak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Orang tua dari daerah perkotaan lebih banyak yang mendukung kebijakan ini dibandingkan dengan orang tua dari daerah pedesaan dan terpencil. Untuk lebih jelas, hasil survei dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

**Tabel 2.** Hasil Survei Persepsi Orang Tua Terhadap Kebijakan

| Kategori Persepsi | Jumlah Orang Tua | Persentase (%) |
|-------------------|------------------|----------------|
| Sangat Positif    | 20               | 20%            |
| Positif           | 58               | 58%            |
| Netral            | 12               | 12%            |
| Negatif           | 8                | 8%             |
| Sangat Negatif    | 2                | 2%             |
| Total             | 100              | 100%           |

Orang tua di daerah perkotaan mengakui bahwa kebijakan ini membantu mereka untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan dasar tanpa harus khawatir tentang biaya pendidikan yang tinggi. Mereka juga merasa bahwa pendidikan dasar yang baik dapat menjadi dasar yang kuat bagi anak-anak mereka untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan mencapai cita-cita mereka. Hasil survei menunjukkan bahwa dari total 100 orang tua yang disurvei, 60% berasal dari daerah perkotaan dan 40% dari daerah pedesaan dan terpencil.

Namun, orang tua di daerah pedesaan dan terpencil menghadapi tantangan yang lebih besar. banyak orang tua dari daerah pedesaan menyatakan bahwa mereka masih menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan untuk anak-anak mereka. Jarak yang jauh ke sekolah dan kondisi jalan yang buruk seringkali menjadi hambatan utama. Selain itu, biaya pendidikan tambahan seperti seragam, buku, dan transportasi juga menjadi beban bagi mereka. Data menunjukkan bahwa 40% dari total responden yang berasal dari daerah pedesaan mengalami kesulitan ini, dibandingkan dengan 20% orang tua dari daerah perkotaan yang melaporkan hal serupa.

Beberapa orang tua juga mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap kualitas pendidikan yang diterima anak-anak mereka. Mereka merasa bahwa fasilitas dan kualitas guru di sekolah-sekolah pedesaan dan terpencil masih jauh dari memadai. Orang tua berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah tersebut.

Persepsi positif orang tua terhadap kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun mencerminkan harapan mereka untuk masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Hal ini sejalan penelitian yang dilakukan oleh Setiawati dan Sudira, yang menyatakan bahwa keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka memiliki dampak positif terhadap prestasi dan motivasi belajar siswa (Setiawati & Sudira, 2015).

Namun, tantangan yang dihadapi oleh orang tua di daerah pedesaan dan terpencil menunjukkan adanya kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut laporan UNICEF, kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi masalah serius di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia (Maula et al., 2023). Pemerintah perlu melakukan intervensi yang lebih efektif untuk mengatasi kesenjangan ini.

Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan di daerah pedesaan dan terpencil. Penyediaan sarana transportasi yang memadai dan pembangunan jalan yang baik dapat membantu mengurangi hambatan akses ke sekolah. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan di daerah-daerah tersebut.

Dukungan finansial bagi keluarga kurang mampu juga perlu ditingkatkan. Program beasiswa dan bantuan pendidikan dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan tambahan bagi keluarga yang membutuhkan. Menurut laporan World Bank, program bantuan pendidikan yang tepat sasaran dapat secara signifikan meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mengurangi angka putus sekolah (Rahmatin & Soejoto, 2017).

Peningkatan kualitas pendidikan juga perlu menjadi fokus utama. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan profesional guru, serta penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai, sangat penting untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Menurut penelitian oleh Hendrizal dkk, kualitas pendidikan yang baik memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Hendrizal et al., 2024).

### Faktor-faktor Yang Menentukan Persepsi

**Tabel 3.** Hasil Survei Faktor yang Menentukan

| Faktor                    | Jumlah Guru | Jumlah Orang Tua | Persentase (%) |
|---------------------------|-------------|------------------|----------------|
| Kondisi Ekonomi           | 30          | 35               | 32,5%          |
| Aksesibilitas Pendidikan  | 40          | 50               | 45%            |
| Kualitas Sarana-Prasarana | 20          | 10               | 15%            |
| Dukungan Pemerintah       | 10          | 5                | 7,5%           |
| Total                     |             | 200              | 100%           |

Hasil survei menunjukkan bahwa ada beberapa faktor utama yang menentukan persepsi guru dan orang tua terhadap kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi ekonomi, aksesibilitas pendidikan, dan kualitas sarana-prasarana pendidikan. Kondisi ekonomi keluarga merupakan faktor yang sangat menentukan persepsi terhadap kebijakan ini. Keluarga yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik cenderung memiliki persepsi yang lebih positif terhadap kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun. Mereka merasa mampu mendukung pendidikan anak-anak mereka dan memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh kebijakan ini. Sebaliknya, keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang baik merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka, meskipun biaya sekolah sudah ditanggung oleh pemerintah. Biaya tambahan seperti seragam, buku, dan transportasi masih menjadi beban yang signifikan bagi mereka.

Aksesibilitas pendidikan juga merupakan faktor yang sangat menentukan persepsi. Guru dan orang tua di daerah perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih mudah terhadap fasilitas pendidikan dibandingkan dengan mereka yang berada di daerah pedesaan dan terpencil. Jarak yang jauh ke sekolah, kondisi jalan yang buruk, dan kurangnya sarana transportasi menjadi hambatan utama di daerah-daerah tersebut. Hal ini menyebabkan orang tua dan guru di daerah pedesaan dan terpencil memiliki persepsi yang lebih negatif terhadap kebijakan ini, karena mereka merasa kesulitan dalam mengakses dan memberikan pendidikan yang

layak bagi anak-anak mereka. Kualitas sarana-prasarana pendidikan juga menjadi faktor penting yang menentukan persepsi. Sekolah-sekolah dengan fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas yang baik, perpustakaan, laboratorium, dan akses internet, cenderung mendapatkan persepsi yang lebih positif dari guru dan orang tua. Sebaliknya, sekolah-sekolah dengan fasilitas yang kurang memadai mendapatkan persepsi yang lebih negatif. Guru dan orang tua merasa bahwa tanpa fasilitas yang memadai, sulit untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan oleh kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun.

Faktor ekonomi, aksesibilitas pendidikan, dan kualitas sarana-prasarana pendidikan merupakan faktor yang saling terkait dan bersama-sama menentukan persepsi terhadap kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun. Menurut teori input-output dalam pendidikan oleh Coleman, input-input seperti kondisi ekonomi keluarga, akses terhadap fasilitas pendidikan, dan kualitas sarana-prasarana memiliki dampak langsung terhadap output pendidikan, seperti prestasi siswa dan angka partisipasi sekolah (Haq et al., 2023).

Kondisi ekonomi keluarga menentukan kemampuan mereka untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang baik dapat menyediakan kebutuhan pendidikan tambahan seperti seragam, buku, dan transportasi, sementara keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang baik mungkin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Meskipun pemerintah menyediakan berbagai program bantuan untuk mengurangi beban biaya pendidikan, seperti beasiswa dan bantuan biaya pendidikan, tantangan tetap ada. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masih menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi akses pendidikan di Indonesia (Hakim, 2016).

## SIMPULAN

Persepsi guru dan orang tua terhadap kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, aksesibilitas pendidikan, dan kualitas sarana-prasarana pendidikan. Untuk meningkatkan persepsi positif terhadap kebijakan ini, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dengan meningkatkan bantuan ekonomi, memperbaiki infrastruktur dan transportasi, meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan, serta mendorong partisipasi komunitas dan orang tua, diharapkan implementasi kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh anak di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2024, February). *Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Daerah, 2022 - Tabel Statistik*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WlRsd2R6a3ljRmhZWWs5S2JYTk9ZbTh5UVhWMGR6MDkjMw==/indeks-kedalaman-kemiskinan-dan-indeks-keparahan-kemiskinan-menurut-daerah.html?year=2022>
- Coleman, J. S. (1966). *Sistem Pertukaran Sosial: Seri Dasar-Dasar Teori Sosial*.
- Hakim, L. (2016). Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1). <https://doi.org/10.30596/edutech.v2i1.575>
- Haq, A. M., Sujarwanto, S., & Hariyati, N. (2023). Manajemen Inovasi Pendidikan dalam Perspektif Sekolah Efektif. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(4), 861–876. <https://doi.org/10.37329/cetta.v6i4.2870>
- Hendrizal, H., Joni, M., Hijrat, K., Wandu, J. I., & Afrita, N. (2024). Pendidikan sebagai Investasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *El-Kahfi | Journal of Islamic Economics*, 5(01), 81–90. <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v5i01.232>
- Kosasih, E. (2019). Participatory Action Research (PAR) Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Serang. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 2(2). <https://doi.org/10.31506/jipags.v2i2.4880>
- Maula, I., Irwandi, I., Sari, A. L., Sarimin, D. S., & Rondonuwu, R. H. S. (2023). Pendidikan untuk Pemerataan Pembangunan: Memperjuangkan Hak Semua Anak. *Journal on Education*, 5(4), 13153–13165. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2316>
- Melyza, A., & Aguss, R. M. (2021). Persepsi Siswa Terhadap Proses Penerapan Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan Pada Pandemi Covid-19. *Journal Of Physical Education*, 2(1), 8–16. <https://doi.org/10.33365/joupe.v2i1.950>

- Nabillah, T., & Abadi, A. P. (2020). Faktor Penyebab Rendahnya Hasil Belajar Siswa. *Prosiding Sesiomadika*, 2(1c).
- Nihayah, E. S. (2016). Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Surabaya). *Paradigma*, 4(1).
- Prabowo, G., & Aimah, S. (2024). Analisis Perencanaan Kebutuhan Guru Berbasis Data Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Indonesia (JOUPI)*, 2(2), 159–168. <https://doi.org/10.62007/joupi.v2i2.326>
- Rahmatin, U. Z., & Soejoto, A. (2017). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Jumlah Sekolah Terhadap Angka Partisipasi Sekolah (Aps) Di Kota Surabaya. *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan*, 1(2), 127–140. <https://doi.org/10.26740/jpeka.v1n2.p127-140>
- Rosyulianty, K., Aswandi, A., & Wahyudi, W. (2018). Upaya Peningkatan Partisipasi Keluarga Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun di SMPN 1 Salatiga. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 6(12). <https://doi.org/10.26418/jppk.v6i12.23283>
- Sanga, L. D., & Wangdra, Y. (2023). Pendidikan Adalah Faktor Penentu Daya Saing Bangsa. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, 5, 84–90. <https://doi.org/10.33884/psnistek.v5i.8067>
- Sari, D. W., & Khoiri, Q. (2023). Pendidikan untuk Semua: Studi pada Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun. *Journal on Education*, 5(3), 9441–9450. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1757>
- Setiawati, L., & Sudira, P. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar praktik kejuruan siswa SMK program studi keahlian teknik komputer dan informatika. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 5(3), 325–339. <https://doi.org/10.21831/jpv.v5i3.6487>
- Sugiyono, D. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D/Sugiyono*. Alfabeta 15.
- Tambunan, A. T., Revida, E., & Rujiman, R. (2020). Partisipasi Pemuda Dalam Meningkatkan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Bagi Masyarakat Kelurahan Denai Kota Medan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 39–63. <https://doi.org/10.37064/jpm.v8i1.7142>
- Triwijayanti, N., Sanoto, H., & Paseleng, M. (2022). Pengaruh Kualitas Layanan Pendidikan, Budaya Sekolah, Citra Sekolah Terhadap Kepuasan Orang Tua. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 12(1), 74–80. <https://doi.org/10.24246/j.js.2022.v12.i1.p74-80>
- Wahyudi, M. A., & Lutfi, A. (2019). Analisis Reformasi Pendidikan dalam Mewujudkan Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 191–201. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i2.2921>
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129–153. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58>